

Prahara *Digital Labor* dalam Bingkai Penafsiran Logika Waktu Pendek dan Kapitalisme Luwes

Hendar Putranto

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia

Article History

Received 7 April 2024

Accepted 20 April 2024

Corresponding Author

hendar2007@umn.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.01.5>

Abstract: *When the COVID-19 pandemic gradually subsided, digital disruption was considered a game changer for today's work, such as work from home (WFH). The prevalence of digital disruption in contemporary work has triggered the birth of a digital labor class, which broadly impacts intra- and inter-organizational communication, especially in dealing with work-related risks in an increasingly insecure labor market. In a macro context like this, digital labor within neoliberal higher education institutions became an interesting phenomenon, especially given the worsening conditions of intellectual workers and changes in academic behavior and practices. A recent study showed many practices violating academic integrity in Indonesian higher education institutions, such as plagiarism, data fabrication, improper claims of authorship, contract-cheating, and other violations of professional codes of ethics. To address these problems, the author employed a critical method of the political economy of communication and the sociology of work to analyze 'short-time logic' as an operational mechanism in flexible capitalism, commoditizing workers' time by blurring the boundaries between productive and leisure time and turning the illusion of worker autonomy into a 'sustained contestation.' The 'short time logic' of flexible capitalism deformed intellectual workers in higher education in Indonesia into digital labor because they were constantly conditioned to produce intellectual products with highly competitive metrics but lacking reflection and meaningfulness, which sharpened the gaps in competency-based inequalities and created a new hierarchy of social classes in higher education.*

Keywords: *digital labor; political economy of communication; critical sociology of work; the culture of new capitalism (CNC); cutting-edge firms & worker's talent*

Pendahuluan

Dua hantaman besar menerpa dunia kerja, disrupsi digital dan Pandemi COVID-19, tetapi 'hanya' satu yang diseka; sementara, yang satunya dianggap biasa saja, lumrah, dan normal. Ketika COVID-19 berangsur mulai reda dan tertangani---oleh PBB sudah dinyatakan bukan lagi ancaman kesehatan global (UN, 2023) disrupsi digital justru dianggap sebagai *game changer* (Future Earth, 2020; Chang & Chang, 2023) bagi dunia kerja sekarang (Putranto, 2021; Shirmohammadi, dkk., 2022), misalnya lewat keluwesan aturan bahwa bekerja tidak harus berada di kantor (*Work from Home*). Salah satu konsekuensi besar dari pelaziman atau normalisasi disrupsi digital dalam dunia kerja kontemporer adalah munculnya strata kelas

pekerja digital atau *digital labor* (Xia, 2021), mulai dari klas pekerja prekariat---yang oleh sebagian ahli dilihat sebagai “klas yang paling miskin secara ekonomi dan paling berkekurangan dari tujuh klas yang teridentifikasi,” (Savage, dkk., 2013), atau “*a potentially transformative new mass class*” (Standing, 2014)---, kaum pekerja migran di *Global North* (Lewis, dkk., 2015), *student-workers* (Campbell & Price, 2016), sampai dengan para pekerja teknologi yang berkecukupan (*affluent tech workers*) (Dorschel, 2022). Ringkasnya, semua pekerja yang *job desk*-nya difasilitasi oleh dan tergantung pada penggunaan teknologi digital kiwari, khususnya internet, media sosial, dan kecerdasan buatan, dalam lingkup kapitalisme digital, entah secara langsung maupun tidak langsung, dan berhadapan dengan risiko-risiko kerja dalam pasar tenaga kerja yang semakin tidak aman (Fuchs, 2014; Chun & Agarwala, 2016; Dorschel, 2022; Jarrett, 2022; Munn, 2024).

Perubahan teknologi, dulu dan sekarang, analog maupun digital, tentu saja membawa dampak-dampak tertentu yang perlu direspon oleh pasar tenaga kerja, baik pemberi kerja maupun pekerja, pada sektor formal maupun informal. Salah satu pokok perubahan terkait ‘dampak negatif’ (yang biasanya dipersepsi sebagai *ancaman*) dari digitalisasi atau disrupsi digital terhadap dunia kerja berbunyi sebagai berikut: “(ancaman yang dibawa oleh disrupsi digital) hadir dalam bentuk sejumlah tantangan baru yang dihadapi pemberi kerja dan pekerja. Teknologi digital dan layanan digital mengubah aturan bekerja serta sejumlah prasyarat yang dituntut dari pekerja seperti kompetensi, pengetahuan, kecakapan dan sikap” (Chinoracký & Čorejová, 2019). Selain itu, perusahaan yang digerakkan ‘roda’ kapitalisme platform dijital, contohnya perusahaan *Über* atau *Lyft*, berpotensi mengubah pekerjaan dan kondisi kerja bagi segmen pekerja tertentu, seperti kondisi pekerjaan yang rentan sekaligus merusak kesehatan (Muntaner, 2018).

Sementara, bentuk teknologi digital dan layanan digital yang ‘mengubah’ aturan bekerja dan tuntutan baru bagi pekerja tersebut adalah munculnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan aplikasi terapannya (*Generative AI*) dalam *large language models (LLMs)*, seperti *ChatGPT-4*. Berdasarkan survey dan laporan yang dirilis *Accenture* (2023), *Generative AI* dapat memengaruhi 40% waktu kerja. Kemunculan *Generative AI* membuat ‘transformasi kerja lintas industri’ (lihat Gambar 3 pada laporan *Accenture*, 2023, h. 11) dapat dibaca dan ditafsirkan sebagai akselerasi hilangnya sejumlah pekerjaan yang tadinya menjadi *domain* dan spesialisasi manusia (Shine & Waiting, 2023).

Dalam konteks makro seperti inilah keberadaan klas pekerja digital dalam sektor pendidikan tinggi nasional maupun global, yang oleh sebagian ahli dinamai sebagai *neoliberal university* dan *edufactory* (Hall & Bowles, 2016; Hall, 2018, 2020; Manathunga & Bottrell, 2019; Troiani & Dutson, 2021; Waite & Waite, 2021; Morley, 2024), menjadi sesuatu yang dapat dibayangkan dan dijadikan objek studi. Meskipun di atas kertas dan berdasarkan sejumlah temuan penelitian dapat diafirmasi bahwa ada cukup banyak cara “orang mengorganisasi dirinya secara kolektif, menantang sekaligus meningkatkan kondisi pekerjaan mereka, mulai dari serikat pekerja tradisional, koperasi, dan asosiasi-asosiasi profesional yang mirip dengan serikat pekerja” (Lazar & Sanchez, 2019), tapi kondisi para pekerja intelektual dalam universitas yang semakin berhaluan neoliberal tidak dapat dipungkiri menunjukkan gejala-gejala yang cukup mengkhawatirkan, terutama ketika dilihat dari eksisnya pada sejumlah perilaku dan praktik akademis.

Temuan terkini di Indonesia menunjukkan keberadaan dan keberlangsungan sejumlah praktik akademis yang liminal dan ambigu. Artinya, para dosen sebagai aktor utama dari praktik akademis dalam sektor pendidikan tinggi hampir selalu diposisikan dan meletak dalam tegangan antara melakukan kerja-kerja intelektual secara jujur pada satu sisi, dan berkompromi dengan sejumlah cara-cara ‘ekstra’ yang tidak selalu bertumpu pada pandangan dan pemahaman soal integritas akademis yang berterima, pada sisi yang lain. Reportase mendalam untuk membongkar praktik pelanggaran akademis yang terjadi di Indonesia yang diinisiasi *The Conversation Indonesia* berkolaborasi dengan *Majalah Tempo* dan juga *Jaring.id* (Rahmitasari & Krismantari, 2024) memberikan gambaran suram tentang sejumlah praktik pelanggaran integritas akademis yang mencoreng wajah dunia pendidikan tinggi Indonesia di mata dunia. Di antaranya adalah plagiarisme, fabrikasi data, klaim kepenulisan (*authorship*) yang tidak sesuai dengan kontribusi nyata yang diberikan dalam penulisan naskah, *contract-cheating* (Al-Asyari & Salina, 2023; bdk. Ali, dkk., 2021), dan pelanggaran kode etik profesional kecendekiaan lainnya yang terlihat, di antaranya, dalam peningkatan jumlah retraksi artikel ilmiah yang ditulis oleh dosen-*cum*-peneliti Indonesia¹.

Benang kusut persoalan pelanggaran integritas akademis di Indonesia (dengan macam-macam variannya di atas) tidak dapat dilepaskan dari fenomena neoliberalisasi pendidikan tinggi dan *digital labor* yang mengawali tulisan ini. Belum lagi ditambah dengan simpang-siurnya kejelasan rumusan dan aplikabilitas sejumlah regulasi yang berlaku untuk dunia pendidikan tinggi di Indonesia sejak era Reformasi 1998. Yang terbaru adalah diberlakukannya kebijakan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang “menciptakan kehancuran pada praktik pendidikan nasional” (Suwignyo, 2023) dan menuai banyak kontroversi dalam praktiknya, seperti perdagangan orang berkedok kerja magang keluar negeri (dalam kasus *Ferienjob* pada akhir 2023 lalu yang baru terbongkar dan diselidiki pihak kepolisian pada penghujung Maret 2024). Centang-perenangannya situasi dan kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang digambarkan secara ilustratif di atas perlu dibaca secara kritis, ditafsirkan, dan dikomunikasikan secara jernih kepada publik agar gugus solusi yang berterima bagi banyak pihak pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dapat dirumuskan dan ditindaklanjuti.

Menyikapi gugus persoalan di atas, penulis menawarkan sebuah analisis ekonomi politik komunikasi kerja dan organisasi kerja yang bertolak dari argumen berikut: bahwasanya prahara soal *digital labor* dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditafsirkan dengan menggunakan bingkai bekerjanya ‘logika waktu pendek’ sebagai mekanisme operasional dalam kapitalisme luwes, terutama ketika fenomena *digital labor* ditinjau secara keilmuan ‘sosiologi kritis tentang kerja’ (Richard Sennett) dan ‘ekonomi politik komunikasi dalam organisasi kerja’ (Fuchs dan Mosco). Gagasan tentang ‘logika waktu pendek dan kapitalisme luwes,’ serta kritik atasnya, dipercaya dapat memberikan terang pemahaman baru untuk memahami fenomena *digital labor*, khususnya dalam cakupan yang lebih sempit dan spesifik, yaitu para pekerja intelektual dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia dan trayektorinya dalam lanskap global.

¹ Untuk data dan diskusi soal retraksi artikel ilmiah terkini, lih. <https://sciencewatchdog.id/2024/03/26/data-terbuka-retraksi-artikel-ilmiah/>; <https://publicationethics.org/news/open-retractions-data-podcast>; dan <https://anjani.kemdikbud.go.id/retractions>

Metode Penelitian

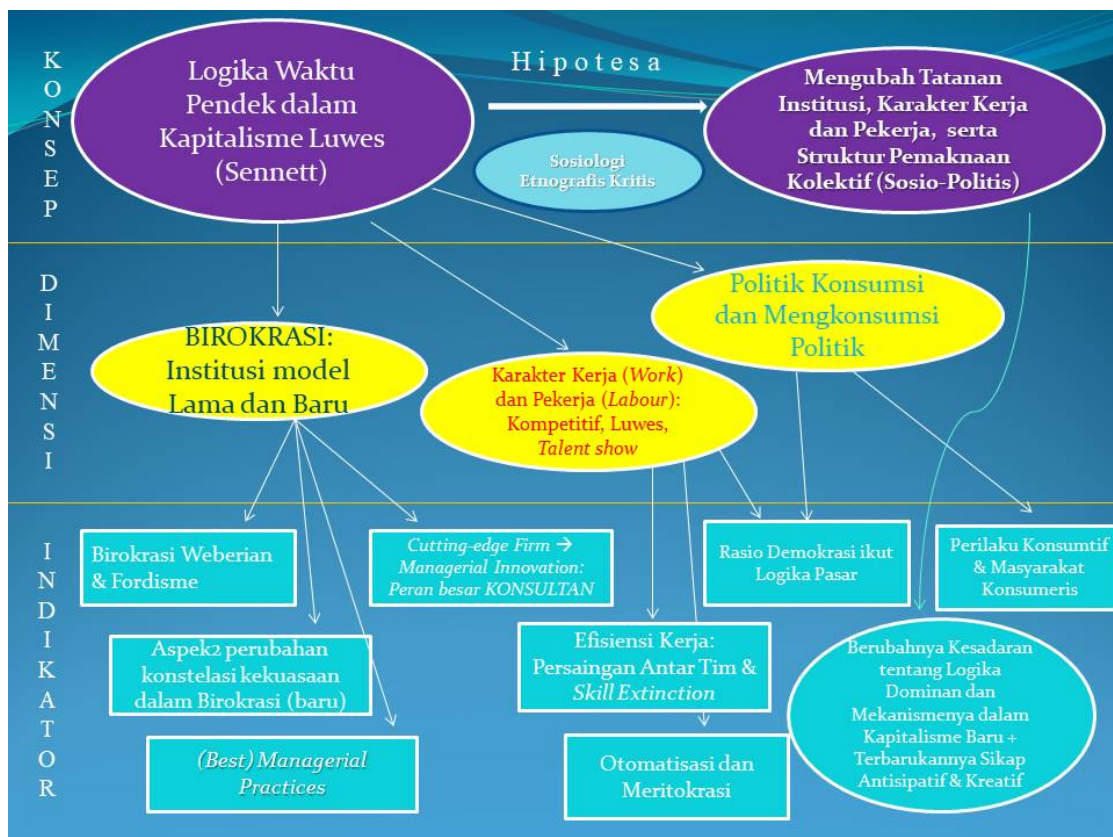
Penelitian ini menggunakan metode *conceptual review* dengan paradigma ‘ekonomi politik komunikasi’ sebagai bagian dari paradigma kritis berhaluan Marxis (Mosco, 2009; Fuchs & Mosco, 2016) sekaligus mengadopsi perspektif kritis Ekonomi Politik Media dan Komunikasi (*PEMC*) (Pedro-Carañana, dkk., 2024). Dalam metode ini, penulis mengacu pada tujuan penelitian yang berada di bawah payung ekonomi politik komunikasi, yaitu “menghubungkan proses-proses produksi material tertentu dengan struktur-struktur sosial dan politik yang lebih luas agar dapat menerangi jalan-jalan kemungkinan untuk membayangkan kembali dan membangun struktur-struktur alternatif” (Birkinbine & Wasko, 2014 dalam Wasko, 2024). Berkomitmen untuk menyetia payung paradigma dan tujuan di atas, penulis tidak turun ke lapangan (*field research*) untuk melakukan observasi partisipan, juga tidak melakukan wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, tapi lebih mengutamakan argumentasi yang didasarkan pada “bukti dokumentasi dan analisis atas operasi dari korporasi dan pemerintah” mengingat keterbatasan akses penulis terhadap sumber-sumber kekuasaan organisasi yang menjadi objek studi di sini (lih. Wasko, 2024, xvii).

Selain itu, metode *conceptual review* yang dipakai penulis dalam makalah ini mengikuti alur berpikir Ayala (2018) berikut: “(kajian yang) cenderung berfokus pada interpretasi, atau bagaimana sejumlah penjelasan diletakkan dalam perspektif yang lebih luas (universal)...(sehingga) interpretasi juga berarti pelacakan atas (lahirnya) sebuah gagasan dan bagaimana gagasan tersebut berkembang dalam sejumlah variasi, penggunaan, ekivalensi dan konotasi lintas-waktu, lintas-geografis, lintas-tradisi keilmuan tertentu serta lintas-mazhab berpikir. Hasilnya, gagasan tersebut diteliti dan disituasikan dalam ‘*an intricate network of meanings in an open-ended process.*’”

Guna memperjelas alur metode *conceptual review* ini, penulis menyajikan dua model/skema berpikir Sennett yang ditemukan dalam karyanya, *The Culture of New Capitalism* atau *CNC* (2006). Skema yang pertama meminjam ‘Struktur Pemaknaan Ekonomi’ dari Haryatmoko (2020), sementara skema yang kedua mengacu pada bagan pemodelan riset ilmu sosial dari van Campenhout & Quivy (2011), yang mencakup tataran konsep, dimensi, dan indikator.



Gambar 1. Kerangka berpikir Sennett dalam CNC menurut Haryatmoko (2020)



Gambar 2. Skematisasi 'Logika Waktu Pendek dalam Kapitalisme Luwes' menurut Sennett (2006) dalam bingkai penafsiran 'ekonomi politik komunikasi' dengan mengacu pada model van Campenhoudt & Quivy (2011)

Bertolak dari bagian pendahuluan dan metode di atas, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian berikut:

- (1) Secara struktural, bagaimana terjadinya proses perubahan yang dialami oleh institusi-institusi 'lawas' sehingga sekarang didominasi struktur pemaknaan uang/ekonomi?
- (2) Secara aksiologis, sejauh mana 'logika waktu pendek' memfasilitasi transformasi dari 'kerja tradisional dan konvensional' menjadi 'kerja digital' (*digital labor*) yang menjadi ciri khas 'ekonomi politik komunikasi organisasi' dalam kapitalisme luwes?

Hasil dan Pembahasan

Memahami Konteks Munculnya *The Culture of The New Capitalism (CNC)*

Sebagai sebuah gerakan sosio-ekonomi, modernitas berada di bawah bayang-bayang krisis identitas terutama sejak terjadinya krisis kredit berskala global pada tahun 2007-2008. Krisis global ini memunculkan tanda tanya besar apakah modernitas yang bertumpu pada dan digerakkan oleh cita-cita Pencerahan berhasil mewujudkan kemajuan sosio-ekonomi yang dijanjikannya pada publik, atau ia justru terpuruk di hadapan krisis berkepanjangan yang menggoyang sendi-sendi perekonomian ekonomi global (Sim, 2013, h. 1).

Sosok modernitas yang tertatih-tatih di ambang krisis eksistensinya inilah yang kembali menghangatkan diskursus soal pascamodernitas selama satu dekade lebih (2009-2024) yang dilihat dan dipersepsikan sebagai 'wacana alternatif' terhadap *ambyar*-nya diskursus besar Kapitalisme yang digerakkan 'Logika Budaya Kapitalisme Lanjut' (Jameson, 1991) pasca bubarnya negara Uni-Soviet dan runtuhnya Marxisme sebagai ideologi resminya. Dalam konteks ini, pandangan Lyotard tentang 'pascamodernitas sebagai ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar' (Lyotard, 1979, 1984, h. xxiv) sesungguhnya perlu dipahami sebagai gambaran dari epos sejarah yang dinamis dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan 'gambaran dinamis' di sini adalah bahwa pemahaman tentang pascamodernitas seyogianya tidak hanya berhenti pada penafsiran kronologis atas suatu epos sejarah ketika terjadi "krisis Filsafat Metafisika dan lembaga universitas yang di masa lalu bersandar pada (kejayaan) Metafisika" (Lyotard, 1979, 1984). Selain itu, pascamodernisme dapat ditafsirkan sebagai 'kelanjutan dari cara berpikir modern dengan cara yang lain (...) modernitas yang bergerak menuju pemenuhannya alih-alih transformasi dirinya' (Habermas dalam Aylesworth, 2015, h. 2).

Dalam terang pengertian pascamodernitas tersebut, lahirnya *CNC* dari Sennett perlu dipahami. Dengan menggunakan deskripsi yang tebal, *CNC* Sennett merupakan 'proyek pemenuhan janji-janji modernitas yang belum sempat atau *tertunda untuk direalisasikan*.' *CNC* Sennett muncul dari pengalaman konkretnya meneliti isu 'kerja dan para pekerja di era Kapitalisme pasca 1970-an' secara etnografis. Besar dalam tradisi Gerakan Kiri Baru pada awal 1960-an, Sennett melanjutkan tradisi berpikir ilmu sosial kritis atau *critical sociology*. Pembacaan teksnya merentang dari ilmu-ilmu ekonomi, sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, kajian budaya, dan tata kota. Dalam *CNC*, tidak sedikit pemikir klasik maupun modern yang diacu, seperti Emile Durkheim, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, Georg Lukacs, Michel Foucault, Albert Hirschmann, Hannah Arendt,

Erving Goffman, dan Abraham Maslow. Sejumlah sosiolog kontemporer abad ke-20, di antaranya Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Zygmunt Bauman, Daniel Bell, Otis Duncan, Michael Young, Ulrich Beck, Leslie Sklair, dan Anthony Giddens, juga diacu Sennett dalam *CNC*.

CNC sendiri merupakan hasil pengolahan lanjut dari seri ceramah publik bertajuk *Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* yang disampaikan Sennett atas undangan Universitas Yale pada 2004. Susunan *CNC* cukup sederhana: Satu halaman *Preface*, 15 halaman Pengantar, empat bab inti yaitu *Birokrasi, Bakat dan Momok Ketidakbergunaan, Mengonsumsi Politik*, dan *Kapitalisme Sosial pada Zaman Kita*, 5 halaman catatan akhir, dan ditutup Indeks.

Argumen pokok yang diajukan Sennett dalam *CNC* kurang lebih berbunyi sebagai berikut: “Kultur dominan dari keberadaan firma-firma ekonomi-baru secara dramatis mengubah pengorganisasian kerja, pemenuhan pribadi lewat pekerjaan, dan praktik-praktik politik massa dengan cara-cara yang membahayakan. Sennett mendeskripsikan secara cukup mendetil perubahan ini sekaligus konsekuensi-konsekuensinya. Argumen utamanya adalah bahwa firma-firma pascamodern menyusun dan menegaskan ‘normalitas’ sekarang persis dengan cara yang sama seperti firma-firma Fordis menyusun dan menegaskan normalitas selama tahun 1950-1960-an” (Schwartz, 2009, h. 1225).

Sementara, McRobbie (2012) memperjelas konteks kemunculan *CNC* dengan mengatakan bahwa:

“Perampangan struktur birokrasi dari organisasi/firma besar model lawas menciptakan lapis-lapis baru pekerjaan dan tipe-tipe pekerjaan model lawas menjadi langka bahkan lenyap. Dalam konteks perkembangan dan kemajuan ICT, mesin dan komputer menggantikan orang serta membatasi kesempatan banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan yang permanen atau sekali-seumur-hidup. Di negara-negara berkembang, tingkat pengangguran terbuka maupun terselubung biasanya sudah melewati mayoritas populasi tenaga kerja produktif. Sejumlah ex-negara komunis di Eropa Timur mencatatkan tingkat pengangguran yang tinggi sehingga banyak orang mudanya yang lalu pindah ke kota-kota besar yang lebih menjanjikan kemakmuran di belahan Barat [seperti kota London, Paris, New York, Berlin, Frankfurt, dll.] untuk mencari pekerjaan pada ranah pelayanan sosial. Di negara dunia ketiga, tren yang sama juga terlihat ketika jutaan orang keluar dari negara mereka untuk mengadu nasib di negara-negara yang lebih maju, sehingga menciptakan strata sosial baru yaitu pekerja migran, banting tulang di sektor jasa di negara-negara maju, sambil secara berkala mengirimkan uang atau remitansi ke negara asalnya untuk menopang hidup keluarga dan kerabat yang tidak seberuntung mereka yang memiliki mobilitas lebih tinggi” (h. 162)

Dua kutipan dari Schwartz dan McRobbie di atas memberikan gambaran kontekstual bagi sidang pembaca untuk memahami alasan Sennett membahas tiga isu pokok berikut dalam *CNC* (2006a, h. 12), yaitu:

a) Bagaimana institusi/firma mengalami perubahan dari paradigma dan praktik ekonomi lawas/Fordis ke ekonomi baru/sektor kreatif/kapitalisme luwes. Institusi/firma yang dimaksud Sennett dalam *CNC* ini merujuk pada *cutting-edge firms*, yaitu perusahaan yang sandaran operasionalnya bertumpu pada teknologi maju, finansial global, dan bergerak pada sektor jasa dengan mempekerjakan tiga ribu atau lebih karyawan;

- b) Bagaimana dalam era kapitalisme luwes ini muncul ketakutan baru di kalangan pekerja ketika mereka dianggap *redundant* atau ‘ketinggalan,’ terutama saat dikaitkan dengan model ekonomi baru yang berlabel ‘pencarian bakat dalam *skills society*,’ dan
- c) Bagaimana perilaku konsumsi para konsumen ternyata terkait erat dengan pembentukan sikap politik.

Birokrasi: sosok pekerja dan/dalam Institusi model lama dan baru

Sennett menggunakan kajian sosiologi organisasi Weber dan pemerintahan militeristik Prussia model Otto von Bismarck (bdk. Hanson, 2014, h. 62) ketika menggambarkan model organisasi bisnis dan masyarakat sipil lawas (*kapitalisme sosial*) yang bercirikan: (a) berparadigmakan piramida hirarkis, (b) bertumpu pada operasionalisasi militeristik dalam arti pemberian instruksi atau komando dari atasan yang menuntut ketaatan total tanpa banyak diskusi atau input dari bawahan, serta (c) rutinitas kerja yang dipandu rasionalitas waktu yang terorganisasi.

Meskipun model birokrasi Weberian-Bismarckian semacam ini sudah banyak dikritik ahli sebagai ‘sangkar besi yang memenjara kebebasan pekerja,’ tetapi tingkat kepastian ‘mobilitas karir’ yang *ajeg* dapat menjangkarkan ‘rasa aman’ para pekerja. Stabilitas dan soliditas kelembagaan struktural maupun dampak psikologis yang dimunculkan oleh struktur semacam ini pada para pekerja bermakna positif. Para pekerja sadar-diri atas posisi sosial yang mereka tempati dan berperilaku sebagaimana mestinya sesuai dengan posisi sosial tersebut.

Guncangan mulai muncul ketika arsitektur kelembagaan birokratis ini mengalami perubahan, dari model piramida hirarkis menjadi seperti *MP3 player* (Sennett, 2006a, h. 47-58). Pemegang kekuasaan baru tidak lagi terletak pada jajaran manajerial tetapi di pemilik modal, *shareholder*, atau investor yang sosoknya bisa datang dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, terjadi ‘pengurangan lapis-lapis kekuasaan dalam struktur kelembagaan’ (Sennett menggunakan istilah berikut: *delayering of institutions*). Contohnya, jajaran eksekutif berperilaku bukan lagi seperti atasan dalam model ‘organisasi lawas’ (Weberian), yang memiliki kharisma dan ditakuti bawahannya, melainkan seperti konsultan. Ia/mereka mengatur perusahaan cukup dengan mengirimkan surel pemberitahuan, merumahkan pekerja tidak secara langsung lewat tatap muka, menggeser tanggung-jawab manajerial ke level yang ada di bawahnya dan kepada para pekerja sendiri dengan mengikuti SOP, ketidaktahuan dan ketergantungan pekerja pada keajegan *jobdesk*-nya justru dianggap sebagai liabilitas perusahaan dalam arti negatif (Sennett, 2006a, h. 60).

Perubahan paradigma birokrasi dari model piramida hirarkis Weberian menjadi perayaan atas manajemen-diri membuat organisasi dan perusahaan termutakhir (*cutting-edge organizations*) berupaya menarik sebanyak mungkin orang muda yang berpikiran wirausaha, yaitu mereka yang memiliki kecakapan teknis mumpuni, seperti jasa servis/teknisi komputer, pialang saham (*floor traders in brokerage firms*), para editor dan direktur kreatif di agensi periklanan (Sennett, 2006a, h. 61).

Orang-orang muda yang memiliki kecakapan teknis tinggi ini memang mudah masuk, tapi juga mudah bosan dan berpindah pekerjaan. Pada titik inilah terjadi konvergensi antara

suplai tenaga kerja yang luwes (*flexible labors*), lembaga/perusahaan yang luwes (*flexible institutions*), dalam era baru Kapitalisme, yaitu kapitalisme luwes (*new flexible capitalism*).

Lantas, di mana letak masalahnya? Ketika kekuasaan, otoritas dan tanggungjawab sebagai karakter bawaan dari pemegang otoritas tidak lagi menyatu, seperti pernah terjadi dalam organisasi modern yang berparadigmakan birokrasi militeristik (Weber), keterpisahan antara kuasa dan otoritas (plus tanggung jawab) ini tidak tepat ketika diterapkan pada lembaga layanan publik. Alasannya cukup jelas: Masyarakat sebagai publik yang dilayani terdiri dari baik golongan masyarakat yang mampu dan *self-sustain*, maupun golongan masyarakat yang *needy and dependant* seperti orang sakit, lansia, pensiunan, pengangguran, kaum difabel, PMKS, dan seterusnya. Jika model birokrasi dalam kapitalisme luwes ini dipaksakan ‘masuk’ (diadopsi) dalam tubuh organisasi layanan publik, terjadilah krisis legitimasi pada lembaga-lembaga publik ini (Sennett, 2006a, h. 62).

Secara ringkas, Sennett menyimpulkan munculnya tiga masalah sosial yang terjadi dikarenakan adanya perubahan struktural sebagai dampak dari ‘upaya membongkar sangkar besi birokrasi,’ yaitu: (1) Loyalitas kelembagaan (sebagai pekerja) rendah; (2) Rasa saling percaya informal antar pekerja menjadi berkurang, dan (3) Pengetahuan kelembagaan melemah (Sennett, 2006a, h. 63).

Operasi Pencarian Bakat Berdampak pada Munculnya Momok (merasa) Tidak Berguna

Ada tiga kekuatan yang membentuk ‘momok rasa-tak-berguna’, yaitu derasnya suplai tenaga kerja berskala global, otomatisasi, dan manajemen penuaan (Sennett, 2006a, h. 86, dst.). Dengan menggunakan prinsip untung-rugi, bisnis kapitalisme biasanya mencari tenaga kerja di tempat-tempat yang menawarkan upah murah tapi dengan kecakapan bekerja seadanya. Sennett mengangkat contoh ‘pusat panggilan yang biasanya dilayani para pekerja dari/keturunan India’ (*Indian call centers*). Mereka menguasai dua bahasa atau bahkan lebih. Kecakapan berbahasa mereka sudah diperhalus, meskipun aksen tidak pernah hilang. Mereka juga sudah mendapatkan pelatihan di universitas selama dua atau tiga tahun dan pelatihan internal yang cukup memadai.

Mereka mengembangkan keterampilan khusus bernama *stretch-learning*² dan kecakapan SDM (sumber daya manusia) sehingga tidak tampak seperti orang yang tidak sabaran di telinga pemanggil. Apakah sosok pekerja dengan kecakapan tinggi seperti ini *otomatis* mendapatkan upah tinggi? Sayangnya tidak. Kalau tidak dapat upah yang tinggi, mengapa mereka mau ambil pekerjaan di *call centers*? Sennett menjelaskan bahwa mereka bukan ‘korban sistem,’ karena ‘mereka berpartisipasi dalam sistem ini dan punya kepentingan/minat di dalamnya’ (Sennett, 2006a, h. 89).

Sennett menjelaskan lebih jauh alasan di atas dengan mengatakan bahwa ‘momok rasa-tak-berguna’ mengangkat tirai drama budaya yang tidak diinginkan (2006a, h. 129-130). Menjadi berguna di mata orang lain bisa dilakukan dengan mengembangkan bakat dan keterampilan khusus. Sennett menyebut pengembangan bakat dan keterampilan khusus ini

² *stretch-learning* di sini berarti kecakapan seorang pekerja, khususnya dalam bidang telekomunikasi, untuk memiliki begitu banyak informasi yang ‘hafal luar kepala’ sehingga ketika ada panggilan masuk, petugas atau pekerja yang bertugas mengangkat panggilan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara cepat. Kecakapan ini memungkinkan pergantian secara cepat ke penelepon berikutnya (lih. Sennett, 2006, h. 87).

sebagai ‘cara pengrajin’ (*the craftsman’s way*). Operasinya bertumpu pada paradigma waktu-lambat, akumulasi kecakapan karena ketelatenan observasi dan praktik berulang, tingginya komitmen pada pengerjaan tugas demi nilai ‘tugas atau hasil dari tugas itu sendiri’, sabar menunda kesenangan sementara demi keparipurnaan hasil, serta menyatunya kecekatan tangan (*hand, manual*) dengan kecerdasan kognitif (*head*) (Sennett, 2008).

Akan tetapi, cara pengrajin yang digagas Sennett ini sebenarnya terinspirasi dari *guild* Abad Pertengahan. Justru cara seperti inilah yang mendapatkan tantangan pada era Kapitalisme luwes. Ada alternatif formula nilai lain yang berkebalikan dan justru dijunjung tinggi dalam Kapitalisme luwes, yaitu cepat menjadi kaya (*instant rich*), gratifikasi yang tidak ditunda (*non-delayed gratification*), dan ketenaran (*fame*).

Model Aristokrasi alamiah (bdk. Deneen, 2018, h. 7, 27) karena seseorang memiliki kemampuan luar biasa pada awalnya dilawan dengan model privilese yang diwariskan karena seseorang memiliki ‘keturunan’ darah bangsawan, ningrat, priyayi, dll. Seiring waktu, model privilese ini lalu memudar dan digantikan ‘teknologi pencarian bakat’ yang lebih memuja potensi untuk bermimpi, tumbuh, dan menjadi sukses (semacam ‘satu juta dollar Merry Riana’, *American Idol*, dll.) alih-alih pencapaian masa lalu.

Secara tajam, penelitian Sennett (2006b) tentang bakat (*talent*) membongkar mitos karakter pekerja yang dicari perusahaan masa kini. Sennett menunjukkan bahwa para manajer personalia sekarang justru mencari orang-orang yang mampu ‘melupakan’ kompetensi awali mereka agar siap menjalankan tugas tertentu. Artinya, karakter pekerja yang disukai untuk direkrut adalah mereka yang mampu mempelajari tugas-tugas baru sebagaimana lembaga-lembaga yang mempekerjakan mereka pun mengambil jenis-jenis pekerjaan baru.

Obsesi para pencari bakat dalam Kapitalisme luwes ini nyatanya selaras dengan karakteristik organisasi luwes yang sudah digambarkan pada bagian pembahasan sebelumnya. Wacana tentang perang para pencari bakat yang berebut para pekerja luwes berkecakapan tinggi menghancurkan model kontrak-kerja tradisional yang bertumpu pada perjanjian antara pemberi kerja dengan pencari kerja bahwa mereka akan memberikan *job security* demi memperoleh loyalitas dari pekerja (Brown & Hesketh, 2004, h. 70-71).

Ketidakadilan terjadi justru ketika perusahaan/organisasi dalam Kapitalisme luwes di satu sisi tidak lagi bersusah-payah merawat dan mengembangkan talenta para karyawannya berdasarkan kontrak kerja jangka panjang, tetapi di sisi lain perusahaan justru semakin menuntut agar para pekerjanya bersikap lebih luwes menyangkut kontrak kerja mereka. Atas nama kecakapan luwes dan *skill extinction*, instrumen yang sama dipakai untuk dua keperluan berbeda: yang satu untuk mengeliminasi pekerja yang tidak ‘cakap’ (misalnya: ‘Maaf, Anda di-PHK karena kurang terampil bekerja’), yang satunya untuk mempromosikan individu yang berbakat. ‘Tebar mimpi, PHP, dan masih ada lain kesempatan’ merupakan jargon-jargon penghibur diri pekerja yang ‘galau’ karena mereka terus-menerus merasa ‘kurang berbakat’ dan ‘layak digantikan sewaktu-waktu.’

Politik Konsumsi dan Mengonsumsi Politik

Apakah ekonomi baru dalam kapitalisme luwes menghasilkan jenis politik baru (politik progresif) yang bertujuan menyejahterakan lebih banyak kalangan alih-alih menanggung untung bagi segelintir elit? Sejumlah data dan temuan riset pada bidang ekonomi dan kesejahteraan

menunjukkan bahwa rongak ketidaksamaan (*inequality gap*) dalam hal penghasilan (kekayaan) justru semakin melebar pada era kapitalisme luwes, yaitu 30 tahun terakhir ini (*circa* 1980-2010).

Robert Reich (dalam Sennett, 2006a, h. 131) mengatakan bahwa kita hidup dalam masyarakat *'two-tier'* yang di dalamnya *the skills elite* (para penguasa informasi) dan *the symbolic analysts* bergerak jauh meninggalkan kelas menengah stagnan. Rongak ketidaksamaan seperti ini pada gilirannya menghasilkan *ressentiment* massa atau, dalam bahasa politik sehari-hari, disebut dengan 'gerakan populisme.' Temuan McKinsey Institute (dalam Sennett, 2006a, h. 133-134) menunjukkan bahwa Wal-Mart adalah *the very acme of a cutting-edge firm* yang dengan konsisten mempraktikkan inovasi manajerial secara terus-menerus, melemahkan serikat pekerja, dan memperlakukan karyawan mereka sebagai pekerja lepasan.

Pada simpul ini, Sennett mengambil metafora 'konsumen yang berbelanja di Wal-Mart' untuk menganalisis perilaku warga negara dalam berpolitik dan memilih politisi yang mewakili suara mereka. Tindakan berpolitik itu kurang-lebih sama dengan aktivitas memaknai iklan, yang di dalamnya 'konsumen terlibat memaknai arti iklan tersebut dengan mobilitas dan imajinasinya: gerakan dan ketidaklengkapan sama-sama menambah energi untuk berimajinasi; keajegan dan kekakuan mematikan imajinasi itu' (Sennett, 2006a, h. 149). Masalah muncul ketika hasrat dan praktik mengkonsumsi (iklan) ini diterjemahkan ke dalam ranah dan aktivitas politik para warga negara: 'dramatisasi potensi menggiring spektator-konsumen menginginkan hal-hal yang tidak sungguh-sungguh dapat digunakannya' (Sennett, 2006a, h. 161).

Dengan berkaca pada peristiwa *Realpolitik* belakangan ini, politisi-artis menebar janji-janji politik dalam episode 'dramatisasi potensi' seperti para *sales* produk merayu konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Tujuannya jelas: janji politik yang utopis dan dramatis dengan kedok/dalih emansipatoris, yaitu membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, ternyata tidak pernah benar-benar tuntas terwujud. Alasannya, pesona diinginkan ketika masa kampanye sudah 'habis' [*used up*] ketika warga memilih si politisi-artis di bilik pemilihan suara, persis seperti pesona barang yang diiklankan habis ketika produk itu dibeli dan dimiliki.

Sennett (2006a, h. 162) lalu memetakan lima cara yang di dalamnya 'konsumen-spektator-warga negara' dijauhkan dari ideal politik yang progresif, yaitu ketika mereka ditawarkan (a) *platform* politik yang menyerupai *platform* produk (tidak lengkap informasinya), (b) perbedaan yang hanya cetakan luarnya saja (substansinya sama saja), (c) diminta untuk mendiskon 'kayu lapuk kemanusiaan' (tinggalkan/lupakan mereka yang tidak produktif/cacat/bermasalah), (d) percaya saja pada politik yang ramah-pelanggan, dan (e) tetap *updated* untuk menerima produk-produk politik yang ditawarkan, dalam arti diproduksi dan direproduksi, persis seperti *consumer goods*. Sennett mengantisipasi kekhawatiran yang muncul jika kelima cara ini terjadi, entah bersamaan atau bergantian, dengan mengatakan bahwa ideal politik progresif akan mengalami krisis dan dekadensi dan itu merugikan semua pihak yang berkepentingan.

Digital Labor dilihat dalam perspektif Kapitalisme Luwes

Pertama, bingkai analisis yang digunakan Sennett dalam *CNC* terlihat cukup aplikatif untuk melengkapi kajian Teori Komunikasi dalam ranah Komunikasi Organisasi, Manajemen

Komunikasi, dan Komunikasi Strategis Perusahaan maupun Pelayanan Publik. Secara lebih khusus, pendekatan Sosiologi Kritis dan Etnografis yang diadopsi Sennett dalam tulisannya mengoperasionalkan paradigma kritis dalam kajian ‘ekonomi politik komunikasi’ yang bertujuan untuk mengelaborasi sekaligus mengadvokasi isu *digital labor* (Hesmondhalgh, 2010; Scholz, 2013; Fuchs, 2013, 2014; Wood, dkk., 2019).

Penggunaan paradigma kritis untuk memeriksa relasi kekuasaan yang timpang dalam bentuk-bentuk baru organisasi dalam kapitalisme luwes ini memang tidak mencerminkan keseluruhan realitas yang mungkin dianalisis. Masih mungkin menggunakan paradigma yang lain, di antaranya konstruktivisme dan/atau konstruksionisme sosial, untuk melihat soal, misalnya, bagaimana pengetahuan dan kuasa komunikasi manajerial perempuan pada *top level* beroperasi dalam agensi periklanan dikonstruksi (Angeliqa, 2019).

Kedua, bangkitnya minat para peneliti ilmu-ilmu sosial untuk kembali menggunakan pisau analisis Marxis telah berkembang selama lebih dari satu dekade terakhir ini. Meningkatnya jumlah publikasi dalam rumpun ilmu-ilmu sosial yang menggunakan perspektif Marxis sejak 2008 sampai 2023 menjadi salah satu bukti empiris-tekstual. Penelitian yang diinisiasi Fuchs dan Mosco (2013, 2014, 2016a, 2016b), Kolođlugil (2015), Prodnik (2016), Sandoval (2016), dan Wittel (2016), telah menghidupkan kembali debat berperspektif Marxis untuk menanggapi persoalan *digital labor* pada tataran global (Putranto, 2021).

Meskipun sempat dicap sebagai ‘titik buta,’ Smythe (1977) berhasil menunjukkan bahwa teori Marxis masih relevan untuk menganalisis komunikasi massa yang berkembang dalam budaya Eropa dan yang dipraktikkan secara luas di negara-negara Utara, serta keberadaan lembaga terkait yang menangani masalah periklanan, riset pasar, produk dan desain kemasan. Akan tetapi, seiring mentasnya paham *developmentalism* pada era 1980-an dan diskursus Globalisasi pada era 1990-2000an, pisau analisis Marxisme semakin jarang digunakan untuk menganalisis secara materialis lembaga-lembaga yang roda eksistensinya bertumpu pada “industri kesadaran.” Padahal, abai intelektual ternyata berdampak cukup pragmatis yaitu *taken-for-grantedness* dari ‘kesadaran palsu’ dalam tatanan operasional masyarakat industri. Fuchs dan Mosco (2016) mendalilkan teori komunikasi dari perspektif Marxis. Salah satu luarannya adalah menunjukkan tiga konsep sentral yang berkelindan. Pertama, budaya dan komunikasi merupakan praktik material. Kedua, bahasa dan tenaga kerja saling mengonstitusi. Ketiga, komunikasi dan informasi merupakan contoh dialektis dari aktivitas sosial yang menghasilkan makna sosial.

Tradisi Marxis masih relevan digunakan rumpun keilmuan yang sosio-empiris, seperti Komunikasi dan Kajian Media, hingga saat ini. Fakta bahwa komunikasi selalu terkait dengan sistem ketidaksamaan yang ada dalam masyarakat kelas menunjukkan hubungan antara kuasa dan perlawanan. Di satu sisi, meningkatnya minat peneliti yang menggunakan kerangka analisis Marxis dan terlihat dalam jumlah publikasi yang bertambah harus disambut dengan baik. Pada sisi lain, perlu dikembangkan inisiatif untuk mengubah ciri tata-kelola lembaga yang ada sekarang, yang terlalu berat pada aspek teknis-administratif dan teknis-prosedural dan mendominasi lembaga media yang ada saat ini (bdk. Levi-Faur, 2009, 2017) sekaligus penguatan pelebagaan kajian kritis komunikasi.

Tanggapan dan Kritik

Membaca pemikiran Sennett dalam *CNC* dengan kacamata Genealogi Foucault

Kritik Foucault terhadap proyek Modernitas (Downing, 2008, vii-x) bertolak dari argumen sentral bahwasanya semua bentuk pengetahuan itu sifatnya relatif dan kontingen secara historis serta tidak dapat dipisahkan dari kerja-kerja pengaturan kekuasaan, termasuk di dalam dan lintas disiplin keilmuan yang menjadi *hallmark* dari universitas. Sebagai sejarawan kritis, Foucault mengajak sidang pembacanya untuk menyadari medan magnet kekuasaan dan pengaruh yang membuat masing-masing domain kekuasaan ini eksis dan menghasilkan gugus makna yang khas dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda-beda (Putranto, 2020).

‘Sejarah’ (arkeologi/genealogi) revisionis Foucault bukanlah versi kebenaran sejarah yang sama sekali berbeda melainkan lebih sebagai *relativising correctives*. Artinya, sejarah merupakan kumpulan teks (wacana) yang menafsirkan realitas dengan separuh kebenaran saja [*a partial view of history*], bukan sepenuhnya atau selengkap-lengkapnyanya benar. Yang menjadi kekuatan historiografi Foucault (Gutting dan Oksala, 2019) adalah, Pertama, **Arkeologi**, karena ia berhasil membandingkan sejumlah formasi diskursif yang berasal dari periode sejarah berbeda-beda sehingga ditunjukkan kontingensi dari suatu cara berpikir tertentu yang berbeda sekaligus efektif. Kedua, **Genealogi**, karena ia menunjukkan bahwa suatu sistem berpikir tertentu merupakan hasil dari patahan-patahan kontingen dalam sejarah, dan bukan hasil logis dari *rationaly inevitable trends* (h. 14-15).

Sejarah dari sebuah fenomena budaya selalu melibatkan sejumlah aspek berikut ini: versi resmi (*authorised*) dari peristiwanya, versi masuk-akal (*commonsensical*) dari fenomenanya, gugus narasi dengan maksud yang tersembunyi, sejumlah kebenaran yang tidak dikatakan/disampaikan secara verbal, yang *acapkali membayangkan sebagai latar belakang saja karena ini semua merupakan efek (dampak) dari operasi kekuasaan dalam kerangka ‘kompetisi pengetahuan’ yang lebih besar*; yang resmi dan tidak resmi; yang normal dan yang berbeda (*dissident*). Maka, salah satu *insight* penting yang dapat kita pelajari dari pemikiran Foucault tentang kekuasaan/pengetahuan adalah bahwa *kekuasaan itu bekerja menurut dan dengan cara “diam-diam dan gak pake berisik” sekaligus perintah dan aturan yang keras dan opresif*.

Mengutip Haryatmoko (2020), ada lima konsep kekuasaan modern yang ditolak Foucault: 1) kekerasan model Hobbesian atau kontrak sosial model Locke dan Rousseau, 2) represi model Freud dan Reich, 3) pertarungan kekuatan model Machiavelli, 4) fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologis (versi Marx), dan 5) otoritas karismatis seperti pandangan Max Weber. Bagi Foucault, kekuasaan itu bukan dimiliki, tapi *orang ambil bagian dalam kekuasaan; ia juga menderita karena kekuasaan*, karena kekuasaan itu beragam dan tersebar. Kekuasaan terjadi karena adanya pemisahan, ada perbedaan, karena itu ada ketidaksamaan.

Foucault mengafirmasi pluralitas sumber dan moda kekuasaan (internal & eksternal; resmi maupun tidak resmi; sadar maupun tidak sadar sekaligus; klas sosial maupun non-klas sosial; dominasi sekaligus submisi) sekaligus keragaman operasionalisasi/mekanisme pelaksanaan kekuasaan itu baik dalam wacana, institusi (*panopticon*, misalnya), maupun praktik sosial seperti pendisiplinan tubuh. Di sinilah letak kekuatan sekaligus *kelemahan konseptual* dari *kekuasaan (pouvoir)* versi Foucault, karena ia tidak membedakan dan tidak mengartikulasikan distingsi kekuasaan itu apa sehingga baginya *apapun/siapapun/manapun*

dianggap sebagai sumber atau moda kekuasaan. Di sinilah letak kerancuannya: “di mana-mana ada kekuasaan” (atau, kekuasaan itu beragam dan tersebar), secara metafisis itu berarti justru ‘tidak ada kekuasaan.’

Lebih jauh, Foucault mengatakan bahwasanya sasaran kekuasaan adalah tubuh dan tujuan yang mau dicapai adalah kepatuhan agar (menjadi tenaga) produktif. Dalam konteks Era Informasi berupa digitalisasi data dan pandangan antropologis manusia yang *post-humanism*, analisis Foucault tentang sasaran dan tujuan kekuasaan ini menjadi tumpul. Mengapa? Sasaran kekuasaan masa kini berupa *surveillance capitalism* yang bukan hanya menasar pada “tubuh yang tunduk/patuh dan menjadi produktif”, tapi justru “pikiran/*mindset* juga preferensi afektif manusia dibuat sukarela menjadi produktif berbagi data dirinya (*user behavioral data*), sehingga tanpa disadari olehnya, *privacy dan identitasnya* semakin dalam dikuasai oleh Lima Perusahaan Raksasa Internet yaitu *Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan Apple*.

Dalam arti ini, jika ‘memaksakan’ menggunakan analisis Foucault tentang ‘pendisiplinan tubuh sebagai sasaran rezim kekuasaan’ pada konteks dan problem kontemporer *surveillance capitalism* (Zuboff, 2019) yang mengeksploitasi data diri pengguna tanpa si pengguna merasa dirinya dieksploitasi, yang terjadi adalah paradoks *lain gatal lain digaruk*. Membaca proyek *CNC Sennett* dengan menggunakan perspektif Kuasa/Pengetahuan dari Foucault menghasilkan sejumlah temuan berikut ini:

Pertama, analisis sosiologi kritis Sennett tentang *locus* kekuasaan dalam era Kapitalisme luwes menghunjam pada sosok “pemilik modal, *share-holder*, atau investor yang datang dari berbagai penjuru dunia dalam sistem finansial global, dan juga konsultan” sehingga tercipta rongak kekuasaan antara *top management* yang beragam (tidak tunggal meletak pada diri DirUt atau CEO, misalnya) dengan para buruh atau pekerja di lapisan bawah. Pada tataran permukaan, analisis Foucault tentang *locus* kekuasaan yang tersebar dalam organisasi atau *cutting-edge firms* di era Kapitalisme luwes memang mengena dikarenakan sifat depersonalisasi kekuasaan yang digambarkannya.

Sifat ketersebaran dari *locus* kekuasaan ini dengan demikian mempersulit akuntabilitas kekuasaan terutama ketika terjadi konflik industrial antara buruh dengan pengusaha, karena pemilik modal dan rapat pemegang saham tidak memiliki *wajah* sejelas dan sejernih Direktur Utama atau CEO. Dalam analisisnya, Sennett memang menunjukkan adanya kekuasaan *intermediaries* seperti pengetahuan kelembagaan (*institutionalized knowledge*), untuk menjembatani rongak kekuasaan yang ada dalam organisasi luwes, tetapi itu pun, jika menggunakan perspektif Foucault, perlu selalu dibaca secara ‘relatif dan kontingen secara historis’: mewakili kepentingan dan suara siapakah para pemegang pengetahuan kelembagaan itu?

Kedua, gagasan Foucault tentang “Pendisiplinan tubuh sebagai sasaran kekuasaan guna mencapai kepatuhan agar menjadi tenaga produktif” memang dapat dibaca jejaknya dalam analisis Sennett tentang pencarian bakat dan *talent show* sebagai moda produksi, reproduksi dan distribusi pekerja dalam suatu organisasi luwes. Deru kencang motor kapitalisme luwes menyegerakan punahnya penguasaan kecakapan yang *ajeg (skill extinction)* yang sejalan dengan proses tumbuh-kembang-dan-menjadi-loyalnya pekerja dalam skema kontrak kerja jangka panjang (yang semakin jarang ditemukan dalam Kapitalisme luwes).

Replaceability terasa lebih mengancam para pekerja di sektor ekonomi kreatif dewasa ini yang dapat berujung pada *mental stress* dan *anxiety* yang kontinyu. Ide *Craftsmanship* yang ditawarkan Sennett (2008) dalam arti tertentu dapat mengatasi dikotomisasi *creative labor* dan *manual labor* yang acapkali dijumpai dalam terminologi *gig economy*. Tetapi, bagaimana *craftsmanship* tersebut dapat memberdayakan lebih banyak pekerja sehingga mereka mengalami baik mobilitas vertikal dalam arti peningkatan kesejahteraan, maupun penguasaan seperangkat keterampilan yang berguna dan terpakai dalam organisasi/perusahaan tempat mereka bekerja yang senantiasa dibayang-bayangi disrupsi akibat operasi logika waktu pendek merupakan pertanyaan yang tidak segera dapat ditemukan jawabannya ketika membaca tulisan-tulisan Sennett.

Ketiga, proyek Arkeologi dan Genealogi yang diusung Foucault mengantarkan kita pada suatu kecurigaan sehat tentang relasi (yang timpang) antara kekuasaan dan kebenaran. Dalam pokok pengertian ini, baik jika kita menyimak kritik Habermas terhadap proyek genealogi Foucault. Habermas mengkritik Foucault karena ia ‘tidak memeriksa’ metode genealogi yang diusungnya dengan menggunakan alat yang dipakainya, yaitu *genealogical unmasking*. Sekiranya Foucault cukup *fair* dan saksama menggunakan alat yang ia gunakan untuk mengkritik epos-epos sejarah versi modernitas, maka ia akan menemukan bahwa yang dilakukannya ternyata tidak lebih dari meng-*install* ulang subjek modern yang ‘sanggup melihat pusat sejarahnya sendiri secara kritis.’ Habermas menuduh Foucault tidak konsisten dengan metodenya sendiri karena ia tidak mampu mengatasi persoalan laten yang selalu muncul ketika menggunakan pendekatan interpretif dalam sejarah yaitu “*a self-referential denial of universal validity claims, and a normative justification of critique*” (Habermas, 1987, h. 286, dalam Aylesworth, 2015, h. 34).

Sementara itu, Braget dan Staples (2008) memuji pendekatan yang diambil Sennett dalam *CNC* dengan mengatakan bahwa “Sennett berhasil menggabungkan kritik pascamodernis atas perikehidupan zaman ini yang ditandai dengan fragmentasi, disrupsi, dan kenirmaknaan, tapi dikemasnya secara kreatif-interpretif, bukan dengan merayakan ‘kekacauan sosial’ [*postmodern social dis(order)*], melainkan dengan menyoroti inkarnasi keterasingan sebagai produk niscaya dari hidup di bawah rezim kapitalisme luwes. Dalam arti ini, Sennett masih berakar pada tradisi Teori Sosial Modern.”

Kritik terhadap pemikiran Sennett datang dari sejumlah peneliti seperti Doogan (2001, 2005, 2009) dan Fevre (2007). Hipotesis yang diajukan Sennett tentang ‘akhir dari era bekerja’ (*end of work*) atau ‘datangnya epos nir-keamanan’ (*age of insecurity*) memiliki ciri berikut ini: meningkatnya jumlah pekerja lepas, bertambahnya jumlah kontrak kerja dengan jangka waktu yang lebih pendek, serta adanya ketakutan yang meluas tentang kehilangan lapangan pekerjaan, entah karena serbuan tenaga kerja asing maupun kehadiran robot dan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses *automation* pada perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan tenaga kerja manusia dalam skala besar. Para kritikus ini menuduh para sosiolog yang mengajukan hipotesis di atas, Sennett salah satunya, membuat kekeliruan fatal karena agregat data berskala-besar tidak menunjukkan adanya perubahan struktur yang signifikan menuju tren pekerjaan yang menjadi lebih *insecure* atau bersifat sementara.

Lebih jauh lagi, para kritikus ini melihat bahwa teori-teori sosiologi yang membahas tentang hipotesis ‘*end of work*’/‘*age of insecurity*’ tidak kuat landasan empirisnya.

Bahkan, ‘diam-diam’ para sosiolog ini ikut mendukung kebijakan negara kuat dan kepentingan perusahaan yang cenderung tidak pernah berpihak pada kepentingan para pekerja (buruh), dengan cara menggambarkan mereka (buruh) sebagai sosok yang *lembek*, yang sedikit-sedikit mengeluh, protes, lalu berdemonstrasi, menghadapi dinamika tuntutan pasar dan perubahan kecakapan kerja yang dibutuhkan.

Tweedie (2013) membela karya Sennett dengan mengatakan bahwa para kritikus ini salah memahami antara metode dengan substansi. Penelitian Sennett menggunakan metode *etnografis* yang bertujuan untuk mengungkap secara mendalam sambil memahami dengan empati *pengalaman* para buruh yang diwawancarainya. Jadi, penelitiannya bukanlah penelitian kuantitatif yang mengekstrak lalu menganalisis data makro lanskap pasar tenaga kerja di Eropa (kritik Doogan dan Fevre).

Selain itu, para kritikus Sennett juga keliru memahami bahwa tujuan akhir kritik Sennett terhadap praktik manajerial yang dilakukan *cutting-edge firms* dalam payung kapitalisme luwes sekaligus dampak psikologis dari praktik manajerial seperti ini yang merugikan kehidupan para pekerja lepasan. Menurut Tweedie (2013), “Penelitian dan karya Sennett mengevaluasi perubahan atas *pengalaman* orang bekerja alih-alih mempersoalkan prasyarat kerja kontraktual yang mengikat mereka” (h. 95).

Kesimpulan

Makalah ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian (1) dengan menafsirkan ulang cara-cara institusi ‘lawas’ dalam memberikan pemaknaan atas dunia kerja sebagai penghancuran struktur kolektif menjadi beban individualis yang serba kompetitif. Persaingan demi efisiensi melanggengkan logika kerja dalam institusi baru yang lebih bertumpu pada kekerasan struktural dan dominasi gratifikasi instan lewat insentif. Sementara, pertanyaan penelitian (2) dijawab dengan mengafirmasi bahwa secara aksiologis, ‘logika waktu pendek’ memfasilitasi transformasi dari ‘kerja tradisional dan konvensional’ yang seperti pengrajin (*craftsmanship*), menjadi ‘kerja digital’ (*digital labor*) yang memaksimalkan pertumbuhan secara konstan lewat akselerasi dan efisiensi. Ekonomi politik komunikasi organisasi yang bertolak dari ‘logika waktu pendek’ akan mengomodifikasi waktu pekerjaannya dengan mengaburkan batasan antara waktu produktif dengan waktu istirahat (*leisure*) serta mengubah ilusi otonomi pekerja menjadi ‘drama galau yang berkepanjangan’ karena pekerja akan terus-menerus merasa dirinya ‘kurang berbakat,’ ‘perlu terus mendapatkan pelatihan karena kecakapannya dengan cepat menjadi usang’ dan ‘layak digantikan sewaktu-waktu.’

Para pekerja intelektual dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia dapat dilihat dalam ‘terang analisis CNC’ sebagai *digital labor* karena mereka terus-menerus didorong, dipacu, dan dikondisikan untuk menghasilkan produk intelektual yang masuk, atau dipaksa masuk, dalam metriks yang *highly competitive* (seperti jurnal terindeks *Scopus*, Hibah DIKTI, *H-index*, *International Intellectual Property Index*, dan lainnya) tapi minim refleksi dan pucat kebermanaknaan. Alih-alih mengembangkan budaya akademik yang bertumpu pada kejujuran dan integritas, persahabatan dan kolegialitas yang sehat, ‘logika waktu pendek’ dalam kapitalisme luwes’ justru mempertajam rongak ketidaksamaan berbasis kompetensi dan menciptakan hirarki klas-klas sosial baru dalam dunia pendidikan tinggi. Analisis sosiologi kritis atas kerja dan ekonomi politik komunikasi organisasi berupaya untuk menyingkap lapis-

lapis relasi kekuasaan yang *njomplang* dan terlegitimasi keberadaan regulasi serta mekanisme operasional institusi yang menopangnya.

Daftar Pustaka

- Accenture (2023). A new era of generative AI for everyone. Diakses dari <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document/Accenture-A-New-Era-of-Generative-AI-for-Everyone.pdf>
- Al-Asyari, H. & Salina, F. (2023, January 26). With the upsurge of ‘contract cheating’ in Indonesia, student academic integrity is at stake. *theconversation.com*. Diakses dari <https://theconversation.com/with-the-upsurge-of-contract-cheating-in-indonesia-student-academic-integrity-is-at-stake-198162>
- Ali, H. I. H., Alhassan, A., & HUI, S. K. F. (2021). Fighting contract cheating and ghostwriting in Higher Education: Moving towards a multidimensional approach. *Cogent Education*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1885837>
- Angeliqa, F. (2019). Study of Hermeneutic Phenomenology about Capital Contestation of Women Leaders at Advertising Agencies. *1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 339*, h. 58-65. Atlantis Press.
- Ayala, R. A. (2018). Thinking of conceptual reviews and systematic reviews. *Nursing Inquiry*, 25(4), e12264. Terbit pertama kali pada 16 Oktober 2018. <https://doi.org/10.1111/nin.12264>
- Aylesworth, G. (2015). Postmodernism. Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diakses dari <http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/postmodernism/> pada Kamis, 23 Januari 2020, pukul 10.28 WIB.
- Barbour, C. (2007, 23 September). The Guilt of Having a Good Thing. *New York Times*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2007/09/23/realestate/23habi.html> pada Kamis, 26 Maret 2020, pukul 12.15 WIB.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Beilharz, P. Editor. (1992). *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. Sydney: Allen & Unwin Pty LTD.
- Betancourt, M. (2015). *The Critique of Digital Capitalism: An Analysis of The Political Economy of Digital Culture and Technology*. Brooklyn, NY: Punctum Books.
- Birkinbine, B. J., & Wasko, J. (2014). Firm inquiries: Methods for critically researching media corporations in the United States. Makalah yang dipresentasikan dalam *Forms of Inquiry: A Roundtable on Methodologies for the Critical Researcher*. Hyderabad, India: IAMCR Political Economy Section.
- Braget, M. P. & Staples, C. L. (2008). Resensi buku *The Culture of the New Capitalism* karya Richard Sennett. *International Review of Modern Sociology*, 34(1), 154-157. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/41421672>
- Brown, P., Hesketh, A., & Williams, S. (2004). *The Mismanagement of Talent: Employability and Jobs in the Knowledge Economy*. Oxford dan New York: Oxford University Press.

- Campbell, I., & Price, R. (2016). Precarious work and precarious workers: Towards an improved conceptualisation. *The Economic and Labour Relations Review*, 27(3), 314-332. <https://doi.org/10.1177/1035304616652074>
- Chang, C.-W., & Chang, S.-H. (2023). The Impact of Digital Disruption: Influences of Digital Media and Social Networks on Forming Digital Natives' Attitude. *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231191741>
- Chinoracký, R. & Čorejová, T. (2019). Impact of Digital Technologies on Labor Market and the Transport Sector. *Transportation Research Procedia*, 40, 994-1001. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.139>
- Chun, J. J. & Agarwala, R. (2016). Global Labour Politics in Informal and Precarious Jobs. Dalam Edgell, S., Granter, E. & Gottfried, H. (Tim Penyunting). *The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment* (h. 634-650). London: SAGE Publications Ltd.
- Dear, L. (2019). The Imperial/Neoliberal University: What Does It Mean to Be Included? Dalam Breeze, M., Taylor, Y., & Costa, C. (Tim Penyunting). *Time and Space in the Neoliberal University: Futures and fractures in higher education* (h. 93-117). Palgrave Macmillan.
- Deneen, P. J. (2018). *Why Liberalism Failed*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Doogan, K. (2001). Insecurity and long-term employment. *Work, Employment and Society*, 15(3), 419–441. DOI: 10.1177/09500170122119093
- . (2005). Long-term employment and the restructuring of the labour market in Europe. *Time and Society*, 14(1), 65–87. DOI: 10.1177/0961463X05050414
- . (2009). *New Capitalism?* Cambridge: Polity Press.
- Dorschel, R. (2022). Reconsidering digital labour: Bringing tech workers into the debate. *New Technology, Work and Employment*, 37(2), 288-307. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12225>
- Downing, L. (2008). *The Cambridge Introduction to Michel Foucault*. Cambridge University Press
- Fevre, R. (2007). Employment insecurity and social theory: the power of nightmares. *Work, Employment and Society* 21(3), 517–535. DOI: 10.1177/0950017007080013
- Fuchs, C. (2013). Class and Exploitation on the Internet. Dalam Scholz, T. (Penyunting). *Digital Labor: The Internet as Playground and Factory* (h. 211-224). New York dan London: Routledge.
- . (2014a). *Digital Labour and Karl Marx*. New York dan London: Routledge.
- . (2014b). Theorising and analysing digital labour: From global value chains to modes of production. *The Political Economy of Communication*, 2(1), 3–27. Diakses dari <https://www.polecom.org/index.php/polecom/article/view/19/175>
- Fuchs, C. & Mosco, V. (2016). Introduction: Marx is Back – The Importance of Marxist Theory and Research for Critical Communication Studies Today. Dalam Fuchs, C. & Mosco, V. (Tim Penyunting). *Marx in The Age of Digital Capitalism* (h. 1-21). Leiden, The Netherlands: Brill.

- Future Earth. (2020, March 2). *Future Earth Report: 'Digital Disruption' a Game-Changer for Climate*. Diakses dari <https://scitechdaily.com/future-earth-report-digital-disruption-a-game-changer-for-climate/>
- Gutting, G. & Oksala, J. (2019). Michel Foucault. Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diakses dari <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/foucault/> pada Jumat, 20 Maret 2020, pukul 21.07 WIB
- Hall, R. (2020). The Hopeless University: Intellectual Work at the End of the End of History. *Postdigital Science and Education*, 2, 830–848. <https://doi.org/10.1007/s42438-020-00158-9>
- Hall, R. (2018). *The alienated academic: The struggle for autonomy inside the university*. London: Palgrave Macmillan.
- Hall, R., & Bowles, K. (2016). Re-engineering higher education: the subsumption of academic labour and the exploitation of anxiety. *Workplace: A Journal for Academic Labor*, 28, 30–47. <https://doi.org/10.14288/workplace.v0i28.186211>
- Hanson, D. (2014). *Managerial Cultures: A Comparative Historical Analysis*. London dan New York: Routledge.
- Haryatmoko (2020). *Michel Foucault: Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan, Membaca Mekanisme dan Teknik Kekuasaan*. Materi Perkuliahan untuk Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, bertajuk “Seminar Media dan Postmodernisme” pada Kamis, 19 Maret 2020.
- Hesmondhalgh, D. (2010). User-generated content, free labour and the cultural industries. *Ephemera: Theory & Politics in Organization*. 10(3/4), 267-284.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham, NC: Duke UP.
- Jarrett, K. (2022). *Digital Labor*. Cambridge, UK: Polity.
- Kolođlugil, S. (2015) Digitizing Karl Marx: The New Political Economy of General Intellect and Immaterial Labor. *Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society*, 27(1), h. 123-137. DOI: 10.1080/08935696.2014.980678
- Lazar, S. & Sanchez, A. (2019). Understanding labour politics in an age of precarity. *Dialectical Anthropology*, 43, 3–14. <https://doi.org/10.1007/s10624-019-09544-7>
- Levi-Faur, D. (2009). Regulatory capitalism and the reassertion of the public interest. *Policy and Society*, 27(3), 181–191. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2008.10.002>
- . (2017). Regulatory capitalism. Dalam Peter Drahos (Penyunting). *Regulatory Theory: Foundations and applications*. Canberra: ANU Press. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.26>
- Lewis, H., Dwyer, P., Hodgkinson, S., & Waite, L. (2015). Hyper-precariou lives: Migrants, work and forced labour in the Global North. *Progress in Human Geography*, 39(5), 580-600. <https://doi.org/10.1177/0309132514548303>
- Lyotard, J-F. (1979, 1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Penerjemah: Geoff Bennington dan Brian Massumi. Pengantar: Fredric Jameson. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Manathunga, C. & Bottrell, D. (2019). Prising Open the Cracks in Neoliberal Universities. Dalam Manathunga, C. & Bottrell, D. (Tim Penyunting). *Resisting Neoliberalism in Higher Education Volume II* (h. 1-22). Cham, Swiss: Palgrave Macmillan.
- McRobbie, A. (2012). A Good Job Well Done: Richard Sennett and the Politics of Creative Labour. Dalam Heinlein, M., dkk. (Tim Penyunting). *Futures of Modernity Challenges for Cosmopolitical Thought and Practice* (h. 155-177). Transcript Verlag Bielefeld.
- Morley, C. (2024). The systemic neoliberal colonisation of higher education: a critical analysis of the obliteration of academic practice. *The Australian Educational Researcher*, 51, 571–586. <https://doi.org/10.1007/s13384-023-00613-z>
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication, 2nd Edition*. London dan New York: SAGE Publications Ltd.
- Munn, L. (2024). Digital Labor, Platforms, and AI. In: Werthner, H., et al. *Introduction to Digital Humanism*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45304-5_35
- Muntaner, C. (2018). Digital Platforms, Gig Economy, Precarious Employment, and the Invisible Hand of Social Class. *International Journal of Health Services*, 48(4), 597–600. DOI: 10.1177/0020731418801413
- Pedro-Carañana, J., Gómez, R., Corrigan, T. F. & Caballero, F. S. (Tim Penyunting). (2024). *Political Economy of Media and Communication: Methodological Approaches*. Oxfordshire: Routledge.
- Preda, A. (2001). Postmodernism in Sociology. Dalam Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (Tim Penyunting). *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 20, h. 11865-11868. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Ltd.
- Prodnik, J. A. (2016). 3C: Commodifying Communication in Capitalism. Dalam Fuchs, C. & Mosco, V. (Tim Penyunting). *Marx in The Age of Digital Capitalism* (h. 233-321). Leiden, The Netherlands: Brill.
- Putranto, H. (2020). Menyibak Operasi Kuasa/Pengetahuan bersama Michel Foucault. Diakses dari <http://komunikasi.hendarputranto.com/2020/03/19/menyibak-operasi-kuasa-pengetahuan-bersama-michel-foucault/>
- . (2021). Covid-19 and the Crisis of Creative Industries in Digital Capitalism: Commodification of Digital Media Workers in the Framework of Data as Labor. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 25(2), 9–48. <https://doi.org/10.25170/respons.v25i02.2461>
- Rahmitasari, H. & Krismantari, I. (2024, 28 Maret). Pelanggaran akademis di Indonesia masih marak: merusak ekosistem riset dan menyalahgunakan uang rakyat. Diakses dari <https://theconversation.com/pelanggaran-akademis-di-indonesia-masih-marak-merusak-ekosistem-riiset-dan-menyalahgunakan-uang-rakyat-224516>
- Sandoval, M. (2016). Foxconned Labour as the Dark Side of the Information Age: Working Conditions at Apple’s Contract Manufacturers in China. Dalam Fuchs, C. & Mosco, V. (Tim Penyunting). *Marx in The Age of Digital Capitalism* (h. 350-395). Leiden, The Netherlands: Brill.

- Savage, M., Devine, F., Cunningham, N. & Taylor, M. (2013). A New Model of Social Class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. *Sociology*, 47(2), 219–250. DOI: 10.1177/0038038513481128
- Scholz, T. (2013). Why Does Digital Labor Matter Now? Dalam Scholz, T. (Penyunting). *Digital Labor: The Internet as Playground and Factory* (h. 1-9). New York dan London: Routledge.
- Schwartz, H. (2009). Resensi Buku *The Culture of the New Capitalism* oleh Richard Sennett. *American Journal of Sociology*, 114(4), 1225-1227. DOI: 10.1086/599148
- Sennett, R. (2006a). *The Culture of the New Capitalism: The Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics*. New Haven & London: Yale University Press.
- . (2006b). What Do We Mean by Talent? *The Political Quarterly*, 77(1), 163-167.
- . (2008). *The Craftsman*. New Haven & London: Yale University Press.
- . (2012). *Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Co-operation*. New Haven & London: Yale University Press.
- Shine, I. & Whiting, K. (2023, May 4). These are the jobs most likely to be lost – and created – because of AI. *World Economy Forum*. Diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2023/05/jobs-lost-created-ai-gpt/>
- Shirmohammadi, M., Au, W-C., & Beigi, M. (2022) Remote work and work-life balance: Lessons learned from the covid-19 pandemic and suggestions for HRD practitioners. *Human Resource Development International*, 25(2), 163-181. DOI: 10.1080/13678868.2022.2047380
- Sim, S. (2013). *Fifty Key Postmodern Thinker*. Oxon dan New York: Routledge.
- Smythe, D. W. (1977). Communications: Blindspot of Western Marxism. *Canadian Journal of Political and Social Theory*, 1(3), 1–27.
- Standing, G. (2014). Understanding the Precariat through Labour and Work. *Development and Change*, 45(5), 963-980. <https://doi.org/10.1111/dech.12120>
- Suckert, L. (2021). The coronavirus and the temporal order of capitalism: Sociological observations and the wisdom of a children's book. *The Sociological Review*, 69(6), 1162-1178. <https://doi.org/10.1177/003802612111024890>
- Suwignyo, A. (2023, 10 Januari). Guncangan Kampus Merdeka. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/09/guncangan-kampus-merdeka>
- Troiani, I. & Dutson, C. (2021). The Neoliberal University as a Space to Learn/Think/Work in Higher Education. *Architecture and Culture*, 9(1), 5-23. DOI: 10.1080/20507828.2021.1898836
- United Nations (2023, May 5). WHO chief declares end to COVID-19 as a global health emergency. *UN News*. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2023/05/1136367>
- van Campenhoudt, L. & Quivy, R. avec la collaboration de Jacques Marquet. (2011). *Manuel de recherche sciences sociales, 4e édition*. Paris: Dunod.
- Waite, D. & Waite, S. F. (2021). The Work of the Neoliberal University: A Critique. Dalam Zajda, J. (Penyunting). *Third International Handbook of Globalisation, Education and Policy Research* (h. 171-191). Cham, Swiss: Springer.

- Wasko, J. (2024). Foreword. Dalam Pedro-Carañana et al. (Tim Penyunting). *Political Economy of Media and Communication: Methodological Approaches*. Oxfordshire: Routledge.
- Wittel, A. (2016). Digital Marx: Toward a Political Economy of Distributed Media. Dalam Fuchs, C. & Mosco, V. (Tim Penyunting). *Marx in the Age of Digital Capitalism* (h. 68-104). Leiden, The Netherlands: Brill.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Networked but Commodified: The (Dis)Embeddedness of Digital Labour in the Gig Economy. *Sociology*, 53(5), 931–950. DOI: 10.1177/0038038519828906
- Xia, B. (2021). Rethinking digital labour: A renewed critique moving beyond the exploitation paradigm. *The Economic and Labour Relations Review*, 32(3), 311-321. <https://doi.org/10.1177/10353046211038396>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs.